

NOTULENSI

Multistakeholder Forum II Tahun 2023 (Money B06 RAN OGI VII Tahun 2023-2024)

Rabu, 16 Agustus 2023 | 10:00 – 12:00 WIB

LATAR BELAKANG

Implementasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024 telah melalui semester pertamanya (B06). Untuk meninjau kemajuan implementasi, Sekretariat Nasional OGI telah membuka periode pelaporan data dukung dari Juni hingga 14 Juli 2023. Sekretariat Nasional OGI kemudian melakukan peninjauan hasil data dukung dan menyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi (Money) periode B06 RAN OGI VII Tahun 2023-2024. Pertemuan Multistakeholder Forum (MSF) II Tahun 2023-2024 diselenggarakan dalam rangka membahas hasil laporan tersebut.

TUJUAN

Tujuan dari rapat ini antara lain:

1. Membahas hasil Money implementasi capaian sampai dengan bulan ke-6 (B06) atau Semester I RAN OGI VII Tahun 2023-2024
2. Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses ko-kreasi.

PEMBAHASAN

Bagian 1: Pengantar

1. **Priyanto Rohmattullah** selaku Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas memberikan pengantar sebagai berikut:

Perkembangan Pelaksanaan OGI

- Pada tahun ini ada perluasan Dewan Pengarah OGI sehingga ada keseimbangan antar anggota Kementerian/Lembaga dan Organisasi Masyarakat Sipil sesuai dengan standar baru partisipasi dan ko-kreasi OGP.
- Ada 4 kegiatan utama yang telah dilakukan pada enam bulan pertama untuk implementasi OGI: 1) peluncuran RAN OGI VII oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kepala LKPP dan perwakilan OMS; 2) Open Government Week 2023 yang melibatkan 10 Kementerian/Lembaga dan 14 OMS dengan lebih dari 1,100 peserta; 3) MSF I Tahun 2023 untuk membahas hasil implementasi RAN OGI VI Tahun 2020-2022; 4) Monitoring dan Evaluasi OGP Local di Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Monitoring dan Evaluasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024

- Ada 2 hal yang dinilai dalam Money, yakni capaian administratif dan proses ko-kreasi.
- Dari 15 komitmen RAN OGI VII Tahun 2023-2024, 10 komitmen mendapatkan nilai capaian baik, 3 mendapatkan nilai capaian cukup, dan 1 mendapatkan nilai capaian kurang.
- Sementara untuk ko-kreasi, 6 komitmen mendapatkan capaian ko-kreasi baik, 7 komitmen mendapatkan capaian semi-aktif, dan 2 mendapatkan capaian pasif.
- Ada 3 catatan dan rekomendasi berdasarkan implementasi RAN OGI VII Tahun 2023-2024 sejauh ini. Pertama, perlu adanya penguatan proses ko-kreasi antar pemangku kepentingan. Di beberapa komitmen, upaya ko-kreasi masih diinisiasi secara dominan

oleh masyarakat sipil. Hal ini tidak terlepas dari belum dipahaminya urgensi proses ko-kreasi yang perlu dilakukan dalam pencapaian target RAN OGI.

- Kedua, terdapat 8 Kementerian/Lembaga dan 5 Organisasi Masyarakat Sipil yang belum mengumpulkan data Monev. Sekretariat Nasional OGI akan membuka kesempatan mengumpulkan data 7 hari setelah MSF
- Ketiga, belum adanya regulasi yang mengatur keterlibatan dan tanggung jawab pemangku kepentingan sebagai pelaksana aksi RAN OGI menyebabkan banyak pimpinan belum secara menyeluruh memahami aksi keterbukaan pemerintah dalam RAN OGI. Menanggapi hal ini, Sekretariat Nasional OGI berupaya agar ada dasar hukum lebih kuat berbentuk Perpres.

2. **Maharani Wibowo** selaku Point of Contact Open Government Indonesia memberikan penjelasan poin-poin sebagai berikut:

- Timeline Monev sebagai berikut: 1) pelaporan dari 26 Juni sampai 14 Juli 2023 oleh K/L via portal Sismonev KSP dan OMS via portal OGI; 2) Verifikasi dari 17 Juli sampai 4 Agustus 2023 oleh tim Setnas OGI; dan 3) pengumuman hasil Monev pada 16 Agustus 2023.
- Monev menilai capaian administratif, dan proses ko-kreasi.
- Dari 38 Target Capaian K/L, 25 target (66%) memiliki kinerja baik dan 13 target (34%) memiliki kinerja kurang. Sementara dari 30 target capaian OMS, 22 target (73%) memiliki kinerja baik, 1 target (4%) memiliki kinerja cukup, dan 7 target (23%) memiliki kinerja kurang.
- Meskipun capaian administratif tergolong baik untuk periode B06, untuk ko-kreasi, hanya 58% target capaian K/L dan 60% target capaian OMS dilaksanakan dengan ko-kreasi aktif.

Bagian 2: Diskusi Pendalaman Komitmen

3. **Ami** dari LKPP memberikan tanggapan sebagai berikut untuk capaian Komitmen 1:

- UK 1: Di bulan Juni, telah ada diskusi dengan 4 Pemprov lain, DIY, Jateng, dan Jatim. Namun, hal ini belum dilaporkan dalam Monev. Data dukung akan disusulkan dan dikomunikasikan dengan Biro Perencanaan untuk pelengkapan. Memang diskusi yang dilakukan dengan masyarakat sipil baru dilaksanakan di Bulan Agustus tanggal 15.
 - Maharani Wibowo menanggapi: untuk data dukung susulan bisa dikirimkan ke Setnas OGI, karena yang bisa mengupload dan melakukan verifikasi pasca periode Monev adalah Setnas OGI.

4. **Kes** dari Indonesia Corruption Watch memberikan tanggapan tambahan untuk capaian komitmen 1:

- Memang ada pergeseran jadwal untuk capaian di UK 1, jadi nanti pelaporan dari ICW sekalian untuk pelaporan data dukung B12.
- UK 7 sebenarnya sudah ada aksi yang dilakukan tapi terlewat upload saat Monev, nanti dokumen susulan akan disampaikan ke Setnas OGI.

5. **Aditya** dari Komisi Informasi Pusat memberikan tanggapan:

- KIP belum mengumpulkan laporan B06, baru akan diupload pada B12.

- Untuk B06 sendiri, sebenarnya KIP sudah membuat FGD yang juga mengundang OMS pada 21 Februari, termasuk ICW. FGD ini adalah untuk evaluasi Monev, tapi memang tidak spesifik untuk indikator pengadaan barang dan jasa.
 - Monev sudah berjalan dan kuesioner evaluasi sudah diedarkan, jadi tidak bisa diubah lagi indikatornya, namun sejauh ini untuk indikator pengadaan barang dan jasa Monev 2023, tetap dimasukkan sesuai dengan Perki 1/2021.
- 6. Nunuk F** dari BPHN memberikan tanggapan sebagai berikut: NA RUU KKR sudah disusun oleh DJHAM, namun belum sampai di BPHN karena ada beberapa perbaikan. RUU KKR sendiri masuk di kumulatif terbuka, jadi kapan pun bisa diajukan pembahasan dengan DPR, dan BPHN masih belum yakin untuk capaian target karena progressnya dijalankan oleh NA.
- Maharani Wibowo menanggapi: komitmen ini memang cukup high call dan sekarang juga dilead oleh Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolkum), jadi mungkin perlu ada diskusi ulang antar pihak Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil untuk meninjau apakah perlu ada revisi ukuran keberhasilan, karena wewenangnya sudah di Kemenkopolkum.
- 7. Usep** dari Perludem menyampaikan tanggapan:
- Mengapresiasi upaya Setnas OGI memfasilitasi pertemuan antar KPU dan Perludem, dan kedepannya dapat dilakukan perbaikan pola komunikasi.
 - Perludem sendiri akan mengaitkan capaian ini di forum antar masyarakat sipil komunitas teknologi dan mengaitkannya ke disinformasi Pemilu, yang harapannya dapat dihadiri oleh KPU.
 - Selain itu, diharapkan data-data kepemiluan ke depannya bukan hanya SIPOL dan SIDAPIL, semoga ke depannya lebih ditingkatkan capaiannya dan ko-kreasi antar KPU dan masyarakat sipil.
- 8. Fadil** dari Direktorat Politik dan Komunikasi Kementerian PPN/Bappenas memberikan tanggapan berikut:
- Untuk KPU, masalah terkait updating data sudah dibahas dengan Sekretariat Nasional OGI. Dit. Polkom juga sudah menginfokan ke KPU mengenai hal tersebut, namun belum ada respons lagi. Mungkin karena ada persiapan lebih urgen untuk Pemilu.
 - Untuk Bawaslu, belum ada komunikasi lagi antar Dit. Polkom dan Bawaslu, akan coba follow up tentang progress Bawaslu.
 - Maharani Wibowo menanggapi: Dit. Polkom diharapkan bisa koordinasi dengan Roren Bawaslu untuk bertanya mengenai hal ini, dan nanti jika ada bahan laporan bisa disampaikan ke Theo Setnas OGI.
 - Ultimate goal dari Komitmen ini adalah adanya peraturan teknis mengenai mekanisme penanganan disinformasi Pemilu. Jika perlu ada penyesuaian kembali target capaian, hal ini bisa dibahas bersama lagi dalam rapat.
- 9. Anwar** dari KOPEL memberi tanggapan tambahan: sudah ada aplikasi yang dibuat Bawaslu untuk penanganan disinformasi, dan sudah cukup lengkap panduan onlinenya, tapi jika secara tertulis panduannya KOPEL belum terima. Selain itu, belum efektif

dijalankan, sehingga masukan tersebut dimasukkan di laporan KOPEL. Harapannya bisa ada MOU antar KOPEL dan Bawaslu agar lebih efektif kerjanya ke depan.

10. Dita dari Kominfo memberikan tanggapan:

- Kominfo melakukan penyusunan *zero draft* peraturan turunan UU PDP, dan hal ini sudah dimulai oleh Kominfo sejak awal tahun.
- Untuk UK 3 mengenai forum konsultasi publik dan capaian masih 0%, sebenarnya di bulan Februari lalu sudah ada inisiasi diskusi publik dengan stakeholder dan menyampaikan rencana penyusunan peraturan pelaksana PDP dan membuka partisipasi dari masyarakat. Proses ini sudah berjalan, TIFA sudah menyampaikan masukannya, tapi untuk penyusunan RPP masih di internal Kominfo. Konsultasi publik RPP ini akan dilakukan sekitar akhir Agustus. Jadi capaiannya memang belum dapat terlihat pada B06.
 - Maharani Wibowo memberikan tanggapan: data dukung dari FGD yang telah dilakukan bisa dikirimkan ke Armita, dan nanti ICW mohon bantuan meninjau apakah informasinya sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sipil.

11. Bernita S dari BPHN memberikan tanggapan mengenai Komitmen 12:

- BPHN sudah melakukan pendampingan/asistensi ke sekitar 20 kantor wilayah yang mengundang lembaga-lembaga setempat terakreditasi bersama dengan sosialisasi penjangkaran OBH untuk 2024. Hal ini akan dilaksanakan sampai sekitar September 2023.
- Dalam asistensi, BPHN sudah membuat peraturan pedoman standar layanan dan standar operasional, dan pedoman ini jadi acuan lembaga-lembaga bantuan hukum tersebut untuk menyusun stopela mereka sendiri. Stopela ini ditargetkan dibuat tahun ini oleh semua OBH sebagai salah satu syarat verifikasi ulang di 2024.
- Kalau untuk panduan, sejauh ini diatur di Peraturan Starlabankum yang sudah disosialisasikan, tapi kalau contoh Stopela sendiri setiap OBH memiliki kekhususan masing-masing. Yang dipetakan, PBHI bisa jadi sample atau contoh Stopela yang baik.
 - Andrieta dari Setnas OGI memberikan tanggapan: Untuk Monev OGI baru menerima konsep dari panduan penyusunan Stopela Bankum dan poin-poin yang mau dimintakan masukan dari masyarakat sipil. Mengapresiasi asistensi yang dilakukan BPHN, namun yang ditargetkan di sini adalah agar Pemerintah dan Masyarakat Sipil bekerja sama untuk membuat panduan yang bisa membantu OBH-OBH di Indonesia menyusun Stopela mereka, yang bisa membantu memperkuat OBH dalam mempersiapkan syarat verifikasi.
 - Terkait sampling dari contoh Stopela PBHI, nanti akan dicrosscheck dengan PBHI mengenai hal ini.

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Ada pun kesimpulan dan tindak lanjut pertemuan sebagai berikut:

1. Kementerian/Lembaga dan masyarakat sipil yang memiliki capaian yang ingin dilaporkan tapi belum disampaikan, bisa disusulkan dengan mengirim capaiannya ke perwakilan Setnas OGI.

2. Pasca B06, Kementerian/Lembaga dan OMS diharapkan bisa berko-kreasi dengan lebih aktif. Jika perlu, Setnas OGI siap membantu untuk memfasilitasi pertemuan agar capaian dapat dilakukan bersama-sama dengan lebih kolaboratif.
3. Bersamaan dengan periode pelengkapan data dukung, laporan monev akan diunggah dan dapat diakses secara publik di website OGI pada link: <https://ogi.bappenas.go.id/monev>.

DOKUMENTASI

CATATAN DAN REKOMENDASI MONEV B06



Penguatan Proses Ko-kreasi antar Pemangku Kepentingan

- Proses ko-kreasi antar pemangku kepentingan belum terjalin aktif pada beberapa komitmen.
- Hal tersebut tidak terlepas dari belum dipahaminya urgensi proses ko-kreasi yang perlu dilaksanakan dalam pencapaian target-target RAN OGI.
- Di beberapa komitmen, upaya ko-kreasi masih diinisiasi oleh masyarakat sipil secara dominan

Rendahnya Pelaporan Para Pemangku Kepentingan

Terdapat 13 pihak, yang terdiri atas 8 (delapan) Kementerian/Lembaga dan 5 (lima) Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yang belum melaporkan Data Monitoring dan Evaluasi B06 RAN OGI VII dalam beberapa Target Capaian di B06.

Penguatan Komitmen Pemangku Kepentingan Pelaksana Aksi Melalui Penguatan Regulasi

Ketiadaan regulasi yang mengatur keterlibatan dan tanggung jawab pemangku kepentingan sebagai pelaksana aksi di dalam implementasi RAN OGI menyebabkan banyak pimpinan belum secara menyeluruh memahami aksi keterbukaan pemerintah dalam RAN OGI.

